



18.000 Data Pemilih Perlu Dicek Ulang

YOGYA (KR) - Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP) yang digulirkan KPU mendapat dukungan Walikota Yogya Haryadi Suyuti. Dirinya bahkan mengajak pemilih untuk bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Salah satu bentuknya dengan menggunakan hak pilih secara sempurna.

"Kali ini kan pemilu serentak yang pertama dan harus kita sukseskan bersama. GMHP menjadi ajang untuk kembali menggugah tanggung jawab masyarakat. Sebagai warga negara dan memiliki hak pilih, ya harus benar-benar menggunakan hak pilihnya tersebut," jelas Haryadi usai menerima jajanan KPU Kota Yogya dalam satu rangkaian GMHP di rumah dinasny, Rabu (17/10).

Selain mengunjungi rumah dinas walikota, jajanan KPU Kota Yogya dalam sehari kemarin juga menyasar seluruh kelurahan, sekolah serta asrama mahasiswa. Dalam GMHP terse-

but, warga yang didatangi akan dicek dalam sistem KPU apakah sudah tercatat sebagai pemilih atau belum. Bagi yang belum terdaftar, akan dimutakhirkan kembali. Sementara data ganda, juga akan divalidasi ulang.

Haryadi menambahkan, menggunakan hak pilih secara sempurna ditandai dengan lima suara yang diberikan yakni untuk DPRD Kota, DPRD DIY, DPR RI, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden. Oleh karena itu, penggunaan hak pilih sebisa mungkin dilakukan sesuai domisili kependudukan.

Plt Ketua KPU Kota Yogya Sri

Surani, membenarkan hal tersebut. Perpindahan pemilih ke daerah lain tetap akan diakomodir melalui form A5 yang bisa diakses di Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hanya, suara yang bisa diberikan otomatis tidak akan penuh. Apalagi jika ada mahasiswa luar DIY yang akan menggunakan hak pilih di Kota Yogya, maka hanya berhak atas satu surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden.

Sementara Komisioner Bawaslu Kota Yogya Noor Harsya Aryo Samudro, mengungkapkan terdapat 18.000 data pemilih yang harus dicek ulang oleh KPU Kota Yogya. Data tersebut merupakan bagian dari 13 juta nama ganda yang diperoleh oleh Kemendagri. "Data ini baru kemarin kami terima salinannya. Kami akan bersama-sama mengecek karena batas waktunya sampai awal November 2018," katanya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005